



Subag Humas dan TU  
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	✓	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

MEDIA
mercusuar

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	✓	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	✓ Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	---------------	------	------	-------------------	-------------------	------	----------	-----------------	---------	----------------------	-----------------

## BPK Izinkan Pemkab Tolitoli Geser Anggaran

TOLITOLI, MERCUSUAR - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mengizinkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli melakukan pegeseran anggaran. Hal tersebut berdasarkan hasil konsultasi Wakil Bupati Tolitoli, Abd. Rahman Budding dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab), Mukaddis Syamsuddin.

Dalam keterangannya, Selasa (7/3/2017), Mukaddis menjelaskan pegeseran anggaran dilakukan karena masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memiliki anggaran kegiatan sebab anggaran sebelumnya masih melekat pada instansi yang lama.

"Ini terjadi karena penyesuaian OPD Tolitoli yang diikuti dengan pengisian personil dalam jabatan struktural yang ternyata masih menyisakan persoalan, khususnya masalah distribusi anggaran yang sudah dituangkan ke dokumen pelaksanaan anggaran 2017," terang dia.

Menurut dia, itu terjadi karena penyusunan dan pembahasan anggaran tahun 2017 telah dilakukan akhir 2016 dan masih mengacu pada nomenklatur OPD lama. Sehingga saat implementasinya di tahun anggaran ini, sejumlah OPD tidak memiliki anggaran kegiatan.

"Sekitar tiga minggu yang lalu, saya beserta Wakil Bupati Tolitoli melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dan BPK Jakarta untuk memperoleh penjelasan tentang pegeseran anggaran itu," terangnya.

Namun tambah Mukaddis, dengan satu catatan, Pemda Tolitoli tidak merubah nama kegiatan, tidak menambah atau mengurangi jumlah anggaran serta tidak menambah kegiatan baru dari yang telah ditetapkan.

"Tanpa harus menunggu pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017, mengingat sejumlah OPD teknis akan melaksanakan program yang sudah direncanakan," ujarnya.

Olehnya, ia meminta khusus OPD, apabila anggaran kegiatannya masih berada di OPD lain, agar segera melakukan pegeseran anggaran dan dikoordinasikan ke Badan Keuangan Daerah dalam waktu yang tidak